

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Politik Dinasti**

Menurut Martien Herna, Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan, dinasti politik ialah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.<sup>1</sup>

Secara sederhana bahwa politik dinasti merupakan terjadinya sebuah regenerasi kekuasaan yang lingkupnya kepada keluarga secara turun – temurun, meskipun pada hakikatnya proses demokratisasi dijalankan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat tetapi kekuatan elit politik lama sangat kuat apalagi di dukung oleh loyalitas dari pendukung dan sumber kekayaan yang melimpah sehingga bisa membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Sedangkan dinasti politik secara sederhanannya merupakan sebab akibat terjadinya politik dinasti tersebut, sebab dinasti ini muncul ketika

---

<sup>1</sup> Martien Herna Susanti, “Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society* Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 2, 2017, hlm.113.

orang kekuasaan ialah salah satu kerabatnya atau keluarganya sehingga memudahkan untuk masuk dalam lingkungan kekuasaan tersebut dengan menduduki jabatan – jabatan yang strategis melalui rekrutmen yang dilakukan penguasa.

Menurut Marcus Mietzner, praktik sebuah pemerintahan yang mengerucut kepada politik dinasti merupakan sebuah penyimpangan dari sistem demokrasi sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi sedang tidak sehat.<sup>2</sup> Politik dinasti merupakan sebuah perkumpulan orang-orang yang memiliki hubungan ikatan kekerabatan dan keluarga yang saling mendukung menduduki jabatan kekuasaan secara berjenjang berdasarkan periode setiap masing-masingnya. Asas dasar politik dinasti merupakan adanya hubungan pertalian sedarah melalui perkawinan yang akan memudahkan menjangkau sebuah kekuasaan lewat pengalaman keluarga yang sebelumnya sehingga dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan relatif mudah karena ada berupa sistem yang menghendaki terjadinya turun temurun jabatan.<sup>3</sup> Dalam keadaan seperti ini tentu sangat berkontradiksi dengan nilai demokrasi meskipun pada kenyataannya diselenggarakan secara dipilih langsung tetapi dengan adanya turun temurun jabatan politik yang

---

<sup>2</sup> Alim Bathoro, "PERANGKAP DINASTI POLITIK DALAM KONSOLIDASI DEMOKRASI", *Jurnal FISIP UMRAH* Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 117.

<sup>3</sup> Rajiv Windi, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara", *Jurnal Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 6, No 03, 2017, hlm. 2.

strategis akan menimbulkan efek membawa kepentingan keluarga dan pribadi bukan berasaskan kepada masyarakat umum. Kemudian dalam hal rekrutmen politiknya akan terjadi secara tertutup yang menghendaki jabatan – jabatan akan di isi oleh kerabat dan keluarga.

Menurut Rajiv, Kunci kemenangan dalam membangun politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa yaitu *pertama*, elit lama memiliki jaringan kekuasaan yang terdiri dari keluarga dan kerabatannya yang masih aktif dalam usaha untuk memperoleh dan merebut kekuasaan. *Kedua*, berasumsi bahwa demokrasi akan memberikan harapan untuk kesempatan bagi elit lainnya dalam usahannya untuk memegang jabatan politis tetapi kenyataannya memperkuat hegemoni elit lama kepada jabatan tersebut. *ketiga* kekuatan elit lama semakin kuat dengan bergabungnya orang – orang yang berpotensi menjadi pesaing politiknya menjadi satu kesatuan bagian dari jaringan kekuasaan tersebut.<sup>4</sup>

Politik dinasti membawa sebuah acuan yang berdasarkan keturunan dan sedarah yang menimbulkan kekuasaan tersebut mengikutsertakan keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya. Menurut Machiavelli sangat penting bagi kelompok penguasa yaitu menciptakan kestabilan politik yang kokoh dan mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Halal menurutnya dalam mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara dalam tujuan mulia hanya untuk menjaga

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,5.

kestabilan politik. Jalan menuju kestabilan politik yaitu dengan menciptakan dinasti politik karena mudah dalam mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan pemimpin dari satu keturunan yang bisa diberikan intruksi sebagaimana keinginan pemimpin sebelumnya.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa model politik dinasti menurut (KKPPOD) Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu; *pertama* model arisan, merupakan kekuasaan yang mengumpul dalam satu keluarga yang berjalan secara turun temurun atau regenerasi kepemimpinan. *Kedua*, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak menjadi Walikota, adik menjadi DPRD dan anggota keluarga lainnya memegang jabatan yang strategis. *Ketiga*, model lintas daerah. Setiap daerah yang berbeda dipimpin oleh satu keluarga yang sama.<sup>6</sup> Dari gagasan tersebut bahwa politik dinasti sangat banyak modelnya, tetapi pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu praktik politik dengan melibatkan keluarga dan kerabatnya. Model yang relevan dengan fenomena politik dinasti yang terjadi di Desa Tawangbanteng ialah model arisan, sebab model tersebut menjelaskan mengenai keadaan politik dinasti yang berasaskan keturunan dan regenerasi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan yang terjadi se-abad lamanya.

---

<sup>5</sup> Ahan Syahrul, Politik Berparas Dinasti, Penelitian *Center for public policy studies* Surabaya, 29 april 2010

<sup>6</sup> Didik Gunawan Suharto *et al*, PILKADA, POLITIK DINASTI, DAN KORUPSI, *Jurnal Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu –Ilmu Sosial PTN SE-INDONESIA*, 2017, hlm 34

Dalam membangun politik dinasti tidak terlepas dari kharisma orang yang pertama memimpin, keadaan tersebut menjadi sebuah dorongan dari kepercayaan masyarakat untuk lebih percaya kepada turunannya karena dianggap akan mewarisi potensi tersebut meskipun belum membuktikan kualitasnya seperti ayahnya. Misalnya di Banten, awal mula terciptanya politik dinasti Banten yang dipimpin oleh Atut. Banten dibangun dan diwariskan oleh ayah Atut yang bernama Chasan Sohib, beliau merupakan tokoh masyarakat yang sangat dihormati dengan ciri khasnya memakai baju hitam – hitam. Kemudian beliau dipercaya untuk memimpin satuan karya (Satkar) yang merupakan penopang Golkar pada saat itu. Hal itu merupakan salah satu akses dari kekuasaan dan membuat usaha bisnisnya berkembang pesat, kemudian keadaan tersebut menjadi batu loncatan untuk memulai masuk ke dalam politik lokal Banten, di mulai dengan menempatkan Atut yang sebagai Wakil Gubernur Banten. Langkah selanjutnya ialah dengan memperluas kekuasaan politiknya dengan mengikutsertakan dan masuk menjadi anggota Legislatif DPR, DPRD tingkat I, II dan DPD. Selain itu jabatan strategis lainnya ditempati oleh keluarga tersebut dengan akses yang mudah karena keluarga dan kerabatnya merupakan pemegang kekuasaan di wilayah Banten.<sup>7</sup> Model yang tepat mengenai politik dinasti Atut ialah model lintas kamar, karena melihat cabang kekuasaan dari keluarga tersebut ada yang menjadi wakil gubernur,

---

<sup>7</sup> Ade Irawan, *et al.*, *DINASTI BANTEN Keruntuhan Dan Kebangkitannya Kembali* (Malang : Intrans Publishing, 2016), p.10.

DPR, DPRD dan pemegang jabatan strategis lainnya. Politik dinasti Atut dan Raden Saleh Kepala Desa hampir sama dalam aspek awal terbentuknya politik dinasti tersebut dengan berawal dari orang pertama yang memimpin dan mempunyai pengaruh kharismatik sehingga mempunyai kepercayaan di masyarakat terhadap keluarga tersebut. keadaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan sesuai dengan kehendak dengan melibatkan masyarakat yang memiliki loyalitas kepada satu keluarga itu.

Terdapat istilah yang mampu menggambarkan mengenai politik kekeluargaan selain dari politik dinasti, dinasti politik yaitu “politik klan” dalam Haryanto dalam bukunya bahwa politik klan merupakan sebuah praktik politik yang dijalankan oleh keluarga dalam upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan istilah “oligarki politik”. Pada umumnya istilah “klan” berarti kelompok/keluarga, suku. dapat di artikan bahwa politik klan merupakan sebuah istilah yang memberikan gambaran mengenai upaya politik kekerabatan untuk mencapai kekuasaan tersebut dengan mengacu kepada jaringan informal dalam bidang ekonomi dan politik mereka bertindak terhadap satu sama lainnya untuk saling mendukung dan menguatkan solidaritas keluarga (Kosals, 2007: 72). Secara harfiah “politik dinasti” dan “politik klan” cenderung memiliki kesamaan perspektif tetapi memiliki perbedaan makna. Politik dinasti merupakan kekuasaan keluarga dalam garis keturunan langsung yang mampu mendominasi secara turun menurun,

sedangkan politik klan lebih mengacu kepada bagaimana keluarga yang menghadirkan kekuasaan.<sup>8</sup>

## 2. Teori Modal

Pierre Bourdieu (1986: 241) untuk mendominasi suatu keadaan sosial tentunya tidak terlepas dari situasi sumber daya *capital* (modal) yang dimiliki seseorang. Menurutnya, modal merupakan akumulasi kerja berupa barang materil maupun simbolik dan di alokasikan secara privat untuk ditujukan memperoleh kekuatan sosial. Modal merupakan energi sosial yang mampu membuahkan hasil dalam sebuah arena perjuangan dalam upaya untuk memperoleh kekuatan sosial atau kekuasaan. Modal secara prinsipil dibedakan menjadi empat kategori yaitu :

### a. Modal ekonomi (kekayaan, uang)

Modal yang paling cepat kemudian mudah langsung dikonversikan menjadi uang yang mampu dilembagakan dalam bentuk hak milik. Modal ekonomi dapat membantu seseorang yang ingin berkuasa untuk memuluskan rencananya tersebut dengan memanfaatkan hartanya sebagai segalanya.

### b. Modal sosial (jaringan, relasi)

---

<sup>8</sup> Haryanto. *Klanisasi Demokrasi Politik Klan Qahhar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: PolGov, 2014), p.13-14

Memiliki sumber daya yang aktual maupun maya karena memiliki jaringan yang tahan lama dengan melalui hubungan timbal balik dari perkenanan dan pengakuan. Modal sosial ini berupa jaringan sosial yang mendukung terhadap orang tersebut, memiliki kepercayaan dari masyarakat terhadapnya sangat kuat dan dengan interaksi yang tidak terputus melainkan semakin erat.

c. Modal kultural (pengetahuan, gelar akademik, bahasa)

Menurut Bourdieu, modal kultural bisa eksis dalam tiga bentuk. *Pertama*, dalam keadaan diwujudkan yaitu dalam bentuk disposisi tahan lama dari pikiran dan tubuh misalnya berbicara (bahasa), perilaku dan cara berjalan. *Kedua*, wujud materi seperti barang budaya yang menunjukkan status sosial karena kepemilikan barang. *Ketiga*, keadaan institusional seperti kualifikasi akademik, gelar atau ijazah yang berhubungan dengan kualifikasi intelektual.

d. Modal simbolik (kehormatan, prestise, karisma).

Memiliki persepsi yang mengakui logika tertentu dengan kehormatan yang dimiliki oleh pelaku sosial. Modal simbolik dapat disimpulkan sebagai sebuah pengakuan yang diterima dari kelompok terhadap individu yang memiliki pengaruh. Menurut Bourdieu Kekuatan modal simbolik yang cukup besar akan

menciptakan kuasa simbolik. Modal simbolik ini merupakan gabungan dari komponen modal sosial, ekonomi dan modal kultural yang melebur menjadi sebuah istilah modal simbolik yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Bourdieu mengambil gagasan dari Max Weber mengenai kharismatik dan legitimasi dalam pengembangan teori kekuasaan simbolik, kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang tidak terlihat sehingga dapat dilaksanakan hanya dengan keterlibatan orang yang tunduk (Swartz, 1996: 76).<sup>9</sup>

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Dinasti**

Ada beberapa faktor mengenai sebab akibat terjadinya politik dinasti, yaitu;

#### **a. Undang – Undang Yang Tidak Jelas**

Undang-undang yang berlaku saat itu sudah ada mengenai mekanisme pemerintahan Desa tetapi pengaturan terkait batasan dan berjalannya pemerintahan Desa belum terjadi pengetatan konstitusi yang mengaturnya khususnya Undang-undang no 14 tahun 1946, sehingga ada kesempatan untuk berkuasa sesuai dengan keinginannya dengan menciptakan politik dinasti. Meskipun dalam hakikatnya dipilih langsung oleh rakyat dalam penentuan pemimpinnya tetapi tidak adanya batasan terkait periode

---

<sup>9</sup> Haryanto, *op.cit.*, hlm 16-17

tentunya hal ini membuat petahana lewat jaringan – jaringan yang kuat akan membantu terciptanya politik dinasti yang sudah dipersiapkannya.<sup>10</sup> Jauh sebelum adanya Undang – undang no 14 tahun 1946 terdapat Undang – undang yang diciptakan kolonial Belanda dan Jepang. Oleh sebab itu, pemerintahan Desa berada dalam naungan pemerintahan kolonial. Undang – undang yang dimaksud ialah UU 1907 no 212 tentang pemilihan Kepala Desa yang di dalamnya terkandung bahwa “para pemilih hanya terbatas pada masyarakat dari kalangan elit Desa karena faktor kedudukan, kekayaan, keturunan, dan pekerjaan”.

Nyata-nya bahwa Undang – undang tersebut tidak mencakup luas melainkan hanya untuk sekelompok orang yang di anggap mempunyai pengaruh dan kharismatik. Sehingga rakyat tidak mengetahui mengenai mekanisme pemilihan yang sesungguhnya dan mudah untuk di mobilisasi oleh orang yang memiliki kekayaan, keturunan terpandang, dan pekerjaan yang mapan untuk mendapatkan kekuasaanya. Pasca Indonesia merdeka langkah cepat di ambil oleh pemerintah Indonesia dengan membuat revisi dari Undang – undang sebelumnya yaitu UU 1907 no 212 tentang pemilihan Kepala Desa menjadi UU no 14 tahun 1946, bahwa cakupan Undang – undang ini luas yang salah satu contohnya dalam pemilih yang berhak memilih yaitu warga negara

---

<sup>10</sup> <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2015/07/21/17055371/Politik.Dinasti.Sebab.Atau.ibat>. Diakses: 29 Agustus 2019 Jam 09.00

yang berumur 18 tahun dan atau sudah menikah, sedangkan Undang – undang sebelumnya sangat sempit yaitu terbatas hanya kepada tokoh masyarakat yang memiliki hak untuk memilih pemimpinnya. Meskipun Undang – undang tersebut di revisi paradigma yang melekat dalam masyarakat yang mengikuti tokoh yang menjadi panutannya untuk dasar memilih bukan terhadap mempertimbangkan dari diri sendiri terkait memanfaatkan hak memilih tersebut. Sehingga mudah untuk di mobilisasi politik oleh tokohnya terkait memilih calon yang menguntungkan bagi tokoh tersebut lewat jaringan kekuasaan yang berusaha mencitakan politik dinasti tersebut.

b. Menurut Karyudi Sutajah Putra Dan Siti Zuhro terdapat empat faktor penyebab munculnya politik dinasti, yaitu

- 1) Demokrasi yang tidak sehat
- 2) Kekuatan jaringan
- 3) Kekuatan modal
- 4) Posisi dalam partai. <sup>11</sup>

Sebuah gagasan dari teori tersebut merupakan sebuah patokan untuk menciptakan sebuah hipotesis dan menganalisis dari lapangan sebelum akhirnya memutuskan sebuah kesimpulan dari hasil lapangan kemudian membandingkan dengan sebuah gagasan teori tersebut.

Kesuksesan terciptanya politik dinasti tidak terlepas dari loyalitas

---

<sup>11</sup> Nur Hidayati, Politik Dinasti Dan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Teknik Mesin*. Polteknik Negeri, Vol 10, No 1, 2014, hlm. 1.

pendukung politiknya terhadap mereka yang sebelumnya memiliki kekuasaan politik sehingga dalam membangun relasi antara pendukung dan penguasa terjaga dengan baik. Selain itu, setiap generasi Kepala Desa yang terlibat dalam dinasti politik mampu memelihara loyalitas pendukungnya dengan konsisten. Diawali oleh Kepala Desa pertama yang telah membangun jaringan-jaringan kekuasaan dan diikuti oleh Kepala Desa selanjutnya dengan cara memperkuat jaringan tersebut supaya terjadinya konsistensi dalam membangun citra dalam masyarakat. Biasanya *feedback* yang diberikan oleh mereka yang terlibat dalam kekuasaan ialah dengan memberikan berbagai keuntungan secara materi maupun non-materi.<sup>12</sup>

#### **4. Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan sebuah fenomena yang sangat misterius yang tidak dapat ditimbang dan diukur bahkan dilihat dengan pancaindera. Dalam realitanya memang kekuasaan ini bisa “dirasakan”, tetapi tidak bisa dikatakan hal ini merupakan pancaindera peraba yang kita miliki. Kekuasaan bukan fenomena fisik yang erat kaitannya dengan fenomena sosial, secara sederhana bahwa kekuasaan ini yaitu seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sehingga orang tersebut

---

<sup>12</sup> Samsul Komar, “*DINASTI KEPALA DESA (Studi Tentang Survivabilitas Dinasti Politik Di Desa Puput Kecamatan Simpangankatis Kabupaten Bangka Tengah)*”, Tesis Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2013, hlm.7-8.

bisa dikendalikan dan tidak mampu untuk melawan kekuasaan tersebut karena sistem kekuasaan mengharuskan seseorang atau kelompok harus tunduk dan patuh baik secara sadar maupun tidak kepada pemilik kekuasaan tersebut.<sup>13</sup>

Legitimasi sangat diperlukan dalam kekuasaan, karena tanpa adanya legitimasi kekuasaan tindakan seseorang maupun secara lembaga tidak akan berjalan dengan sesuai keinginan pemegang kekuasaan tersebut. Begitu pentingnya legitimasi yang merupakan dasar kekuasaan sebagai pendukung dan respon terkait kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok berwenang yang diakui oleh masyarakatnya. Misalnya kekuasaan lembaga fungsional (atas dasar hubungan kerja), keluarga (kekuasaan orang tua atas anaknya), kekuasaan dalam negara (kekuasaan politik).<sup>14</sup>

Menurut C. Wright Mills, kekuasaan merupakan suatu dominasi yang terimplementasi dengan kemampuan untuk melaksanakan suatu kemauannya meskipun orang lain menolaknya. Kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kebijakan umum dalam hal terbentuknya dan proses terjadinya sesuai dengan keinginan yang memiliki tujuan pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan politik berkaitan dengan kehidupan umum yaitu terkait kehidupan manusia dan masyarakat tetapi dalam hal ini tentunya terfokus terhadap negara

---

<sup>13</sup> Koespartono, *KEKUASAAN*. (Jakarta : ERLANGGA, 1987), p. 1.

<sup>14</sup> Samsul Wahidin, *DIMENSI KEKUASAAN NEGARA INDONESIA* (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2007), p.2.

yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan kehidupan sosial dengan tindakan paksaan. Soelaiman Soemadi menyatakan bahwa sebuah kekuasaan politik akan melahirkan tindakan berupa keputusan yang terimplementasi secara formal dengan otoritatif diantara semua nilai yang berada di masyarakat dan kekuasaan politik ini bisa dikatakan sebagai alat “perekat” (*agglutinating effect*) yang berimbas kepada nilai lainnya “mengikutinya” sesuai kehendak yang memerintahnya.<sup>15</sup>

Kekuasaan potensial berarti seseorang yang mempunyai potensi kekuasaan dengan memiliki sumber-sumber yang mendukung kekuasaan tersebut, seperti kekayaan, senjata, pengetahuan, jabatan dan status sosial yang tinggi. Kekuasaan aktual merupakan sebuah kekuasaan yang telah memanfaatkan potensi tersebut terhadap memperoleh kekuasaan secara efektif dan mencapai sesuatu tujuan yang direncanakannya.<sup>16</sup>

“Kekuasaan elite menurut Mosca adalah sebagai akibat sifat-sifat yang tak terbantahkan dari watak sosial manusia. Selanjutnya dikatakan, bahwa kelas politik yang tidak adaptatif dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elite lain akan terbentuk dari kalangan yang diperintah, dan dengan perjalanan waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan. Sistem demokrasi, menurut Mosca tidak memiliki dasar substantif sebagai kekuasaan mayoritas, bahkan dianggap sebagai penyebab kemerosotan elite. Oleh karenanya semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewarisan secara turun temurun agar tetap dapat memanipulasi kekuasaannya. Akan tetapi Mosca juga menyadari, bahwa rekrutmen dari kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Cholisin & Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ombak, 2012), p.42-44

<sup>16</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>17</sup> Alim Bathoro, *op.cit.*, hlm.118.

Dari gagasan tersebut bahwa terjadinya sebuah dinasti politik timbul akibat upaya untuk mempertahankan kekuasaan dalam upayanya untuk melindungi kepentingannya, sebab jika tidak melakukan hal tersebut akan mengalami kemerosotan jika elite dalam kelas politik tidak bisa mempertahankan kekuasaan mayoritas yang sebelumnya di raih. Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk serakah dan ingin saling menguasai, karena manusia selalu kurang puas terhadap sesuatu yang di raihnya sehingga untuk mewujudkan hal yang kurang tersebut manusia akan melakukan hal apapun untuk memenuhi keinginannya dan termasuk untuk berkuasa dalam pemerintahan khususnya dalam pemerintahan desa dengan melakukan regenerasi kekuasaan yang turun menurun.

Kekuasaan sangat sensitif, oleh karena itu kekuasaan harus dibatasi secara jelas agar berjalannya kekuasaan dapat berlangsung dengan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan kewenangan yang semena-mena dan menyebabkan kesengsaraan terhadap orang yang dikuasainya. Batas – batas kekuasaan yang dimaksud yaitu :

- a. Terdapat Undang – undang yang mengatur mengenai batasan umum yang harus dituruti dengan kesepakatan komunal yang dikeluarkan secara formal oleh negara.
- b. Memiliki acuan yang jelas seperti ADART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) untuk menjadi acuan kehidupan yang kolektif

- c. Adanya perjanjian khusus yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama terkait konsekuensi dari pelaksanaan hukum.
- d. Kepatuhan dalam masyarakat setempat yang berlaku dan menjadi dasar moral mengenai kesusilaan dan kepatutan dalam nilai kehidupan.<sup>18</sup>

## 5. Teori Kepemimpinan

### a. Definisi Kepemimpinan

Menurut Griffin (2000), kepemimpinan memiliki dua konsep penting yaitu proses dan atribut. Proses, kepemimpinan yang memiliki titik fokus terhadap yang dilakukan oleh pemimpinannya contohnya; proses pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi bawahannya terhadap tujuan organisasi dan memotivasi terciptanya budaya produktif sebuah organisasi agar tujuan tersebut tercapai. Atribut, kepemimpinan ini harus memiliki karakteristik untuk memimpin dengan tujuan untuk membawa pengaruh terhadap orang-orang yang dipimpinnya tanpa terpaksa dan menerima dirinya sebagai pribadi yang mampu memimpin.<sup>19</sup>

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang telah melekat dalam jiwa manusia, pada hakikatnya semua manusia mempunyai sifat memimpin karena secara sederhananya bahwa manusia memimpin dirinya sendiri untuk hidup di dunia ini. Tetapi untuk skala lebih besarnya mengenai

---

<sup>18</sup> Wahidin, *op.cit.*, hlm 6

<sup>19</sup> Rahayu Ginintasari, "Kepemimpinan", *Jurnal Psikologi*, UPI, hlm. 1.

kemampuan memimpin dirinya sendiri dan juga orang lain semuanya tidak serta merta sama, melainkan hal tersebut bagaimana kemampuan untuk mengekspresikan jiwa kepemimpinannya terhadap kehidupan masyarakat. selain itu, jiwa kepemimpinan dapat muncul ketika seseorang terus belajar dan berlatih dari pengalamannya sehingga dapat mengaktualisasikan kemampuannya untuk memimpin seseorang atau sebuah kelompok masyarakat.

#### **b. Tipe-Tipe Kepemimpinan**

##### 1) Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin seperti terjadi di dalam masyarakat yang tradisional yang memiliki perasaan hormat kepada yang dianggap dituakan dengan latarbelakang tersebut anggota masyarakat ini akan menunjuknya untuk menjadi panutan mereka. Contohnya; para ulama, tokoh masyarakat, dan guru

##### 2) Tipe Kharismatik

Pemimpin ini memiliki daya tarik yang luarbiasa untuk memikat masyarakat untuk menjadi pengikut dan tauladannya. Tipe seperti ini merupakan seseorang yang dikagumi oleh banyak masyarakat meskipun latarbelakang mengaguminya tidak jelas mengapa orang-orang mengaguminya.<sup>20</sup> Menurut Max Weber,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 4.

pemimpin seperti ini diangkat dengan latarbelakang kepercayaan dengan anggapan pemimpin tersebut memiliki berkah karena “tuah/mantra”nya dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya dengan ilmu gaibnya. Timbul anggapan dari masyarakat berpikir terhadap pemimpin yang “kharisma” memiliki kekuatan ilmu gaib untuk memiliki kesuksesan dan menimbulkan rasa kagum dari masyarakatnya.<sup>21</sup>

### 3) Tradisional

Pemimpin seperti ini dipilih berdasarkan kebiasaan tradisi yang telah menjadi turun-temurun, seperti ketika zaman feodal, yang merupakan sistem monarki raja, kepala desa cenderung memilih turunannya untuk menjabat. Sistem seperti melestarikan tradisi yang dianggap baik dan rakyat menganggap dengan sistem tersebut yakin mengundang kebaikan tradisi yang dianut dan tidak berani untuk melanggarnya.<sup>22</sup>

### c. Kepemimpinan Aristokratik Demokratik

Kepemimpinan ini merupakan berasaskan raja – raja penerus kerajaan secara turun – temurun dari satu keluarga dan mentrinya berasal dari rakyat melalui sistem pemilu secara distrik

---

<sup>21</sup> Erviyan Galih, ”*Model kepemimpinan dalam pemerintahan lokal*” Skripsi Unsil, 2018, hlm.24.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 25.

maupun proposional.<sup>23</sup> Model seperti ini hampir mirip dengan politik dinasti, karena dalam menjalankan pemerintahan terdapat keterlibatan keluarga yang berkuasa. Misalnya dalam kekuasaan kepala desa yang secara regenerasi turun – temurun jabatan kepemimpinannya di kuasai oleh satu keturunan atau keluarga. Kepemimpinan ini tidak menghilangkan asa demokrasi, karena dalam sistem rekrutmen menteri dalam kerajaan atau staff pekerja tidak ber-asaskan kekerabatan melainkan menggunakan pemilu atau rekrutmen secara terbuka. Sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk menempati jabatan yang disediakan oleh pemegang kekuasaan.

Dalam benak seorang yang memiliki sifat kepemimpinan aristokratik demokratik ialah mereka beranggapan pemegang kekuasaan secara turun – termurun akan menciptakan estafet kekuasaan yang berjenjang dan terjadinya kestabilan politik. Karena gaya kepemimpinan akan menyesuaikan dengan keluarga yang sebelumnya menjabat agar menjadi mudah dikenali oleh masyarakat umum.

---

<sup>23</sup> Sukarna, “*KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA PEMERINTAHAN TEORI A – Z*”. (Bandung : Mandar Maju, 2006), p.7.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan pembahasan yang relevan dengan politik dinasti dan bermanfaat untuk menjadi referensi penulisan. Kemudian temuan ini penulis sajikan di dalam tabel matriks sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

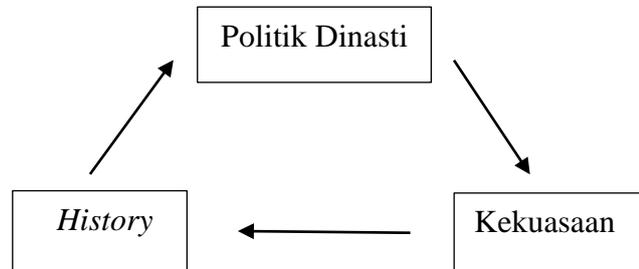
<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Isi Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1.</b>	<b>Jumrah (2018)</b>  Politik dinasti dan monopoli kekuasaan	Penelitian ini membahas mengenai pembentukan politik dinasti dan monopoli kekuasaan bangsawan Bima di pemerintahan yang terdapat di dalam struktur pemerintahan kekuasaannya. Diawali dari munculnya Sultan Abdul Kahir yang saat itu berada dalam kesultanan bangsawan dalam	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai politik dinasti yang berkomposisi keluarga dalam kekuasaannya.	Perbedaan dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai politik dinasti desa yang terjadi terhadap kepala desa yang turun-temurun, sedangkan penelitian terdahulu mengacu kepada komposisi jabatan kekeluargaan

		<p>cakupannya politik lokal. Pengaruh tersebut memunculkan nama Fery zulkarnain, awalnya menjadi ketua DPRD Bima dan setelah itu terpilih menjadi Bupati di Pilkada 2005 dan terpilih kembali di 2010. Selain Fery terdapat saudaranya dan istrinya masuk dalam DPRD dan Birokrasi lokal Bima sehombha menimbulkan jejaring kekuasaan bangsawan.</p>		
2.	<p><b>Rima Helgasari (2018)</b></p> <p>Politik Dinasti Pada Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai politik dinasti sukarno di desa tambaksari yang selalu terpilih secara berturut-turut dari keluarganya</p>	<p>Persamaannya mengenai penelitian ini karena sama membahas politik dinasti tingkat desa dan secara berturut-turut di pimpin oleh satu keturunan yang</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai kepemimpinan dinasti raden dan sukarno terletak kepada lamanya</p>

	Di desa Tambaksari	dan paling banyak generasinya yang terpilih sampai tujuh generasi berturut-turut menjadi kepala desa	sama.	mereka berkuasa dan memiliki ke khasan tersendiri dari setiap dinasti yang tercipta
--	--------------------	--	-------	---

### C. Kerangka Pemikiran

**Bagan 1**



Maksud dari kerangka pemikiran ini ialah, politik dinasti muncul karena adanya kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, dalam upaya mempertahankannya yaitu dengan membuat skema ketika masa jabatan kekuasaan sudah habis dan di saat itu dari jauh-jauh hari telah disiapkan pengganti kekuasaannya oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Disaat itu terjadinya *history* yang melekat bahwa keluarga tersebut mantan penguasa dan hal ini timbul di dalam benak masyarakat, sehingga ketika adanya pengganti calon pemimpin yang akan menduduki singgahsana kekuasaan di suatu daerah maka ia akan terbantu oleh *history* yang telah terbentuk di dalam citra masyarakat. Ketika citra pemimpin sebelumnya baik dan dipandang oleh masyarakat dengan anggapan baik maka citra tersebut akan terjaga, hal ini memudahkan untuk memuluskan rencana estafet kekuasaan yang akan mendorong terjadinya politik dinasti.